



RENCANA STRATEGIS
BIRO ORGANISASI
TAHUN 2011 - 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka salah satu prinsip yang harus dikembangkan adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015 disusun dengan mempedomani beberapa aturan normatif, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015.

Sesuai dengan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, diharapkan Rencana Strategis ini dapat mendukung program-program yang telah ditetapkan Biro Organisasi yang berorientasi pada penyiapan kebijakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan SKPD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi serta fasilitasi dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselesainya Rencana Strategis ini. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas outcome Biro Organisasi, maka rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai bagian dari skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai pedoman rencana kerja tahunan Biro, seluruh Bagian dan Sub bagian lingkup Biro Organisasi.

Jambi, Januari 2012
Kepala Biro Organisasi

dto

Ir. AKHDIYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600826 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategi.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BIRO ORGANISASI	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Biro Organisasi	7
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Organisasi	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI	11
3.1 Identifikasi Permasalahan pada Biro Organisasi	11
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011 - 2015	12
3.3 Isu - isu Strategis	15
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	16
4.1 Visi dan Misi	16
4.2 Tujuan dan Sasaran	18
4.3 Strategi	18
4.4 Kebijakan	18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	19
BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI	21
BAB VII PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

**NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-
2/2012**

TANGGAL : 2012

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Secara Geografis Provinsi Jambi mempunyai luas 53.435 Km² dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 2.788.269 jiwa yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 52,18 orang/Km² (Jambi Dalam Angka, 2008). Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Terdapat 131 Kecamatan, 1.179 Desa dan 150 Kelurahan yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Gambaran Makro Ekonomi Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi yang terus meningkat mencapai 7,16 % di Tahun 2008 (Jambi Dalam Angka, 2008). Hal ini seiring dengan perkembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi sangat Potensial dan Prospektif, hal ini mengingat secara fundamental Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan. Jumlah Koperasi di Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebanyak 2.578 unit, tahun 2006 sebanyak 2.668 unit, tahun 2007 sebanyak 2.717 unit, tahun 2008 sebanyak 2.972 unit dan tahun 2009 sebanyak 3.155 unit. Sedangkan Jumlah UMKM binaan pada tahun 2006 sebanyak 11.605, tahun 2007 sebanyak 17.604 unit, tahun 2008 sebanyak 17.476 dan tahun 2009 sebanyak 18.555 unit. Sehingga total jumlah UMKM Binaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 65.240 unit.

Masing-masing Kabupaten/Kota tersebut pada prinsipnya telah mempunyai perangkat organisasi yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM. Setiap organisasi memerlukan perencanaan ke depan dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang akan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan Kinerja Organisasi. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun ke depan.

Idealnya, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul pada proses Implementasi 5 Tahun berikutnya. Rencana Strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga didalamnya Renstra mengandung komponen-komponen antara lain Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang paling meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis.

Dengan demikian, Biro Organisasi sebagai bagian dari Sistem di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi harus menyusun Renstra tahun 2011 – 2015 sebagai wujud implementasi amanat diatas. Renstra Biro Organisasi adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dipedomani oleh Biro Organisasi dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan daerah Renstra Biro Organisasi yang telah disusun dengan mempedomani RPJMD atau merupakan penjabaran teknis dan RPJMD, maka kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Terdapat bebarapa aturan normatif yang dapat dijadikan landasan hukum penyusunan Renstra Biro Organisasi sebagi berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 39/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
9. Peraturan Gubernur Jambi No. 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi ini adalah memberikan indikator dalam penilaian capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selama periode 2011 – 2015.

Tujuan Penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi ini adalah memberikan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja yang memuat Visi, Misi, Gambaran umum pelayanan, Capaian indikator dan Program selama lima tahun kedepan terhitung mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Disamping itu, Renstra ini juga merupakan bahan untuk penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Setda Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

Sesuai dengan Kisi-kisi Penyusunan Renstra SKPD dalam rangka penyusunan RPJMD Tahap ke-2, maka Sistematis Penulisan Rencana Strategis ini terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan Rencana Strategis

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Biro Organisasi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Organisasi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Organisasi
- 3.2 Telaahan Renstra Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah 2011 – 2015
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran
- 4.3 Strategi
- 4.4 Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BABVI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BIRO ORGANISASI

Biro Organisasi sebagai salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Organisasi

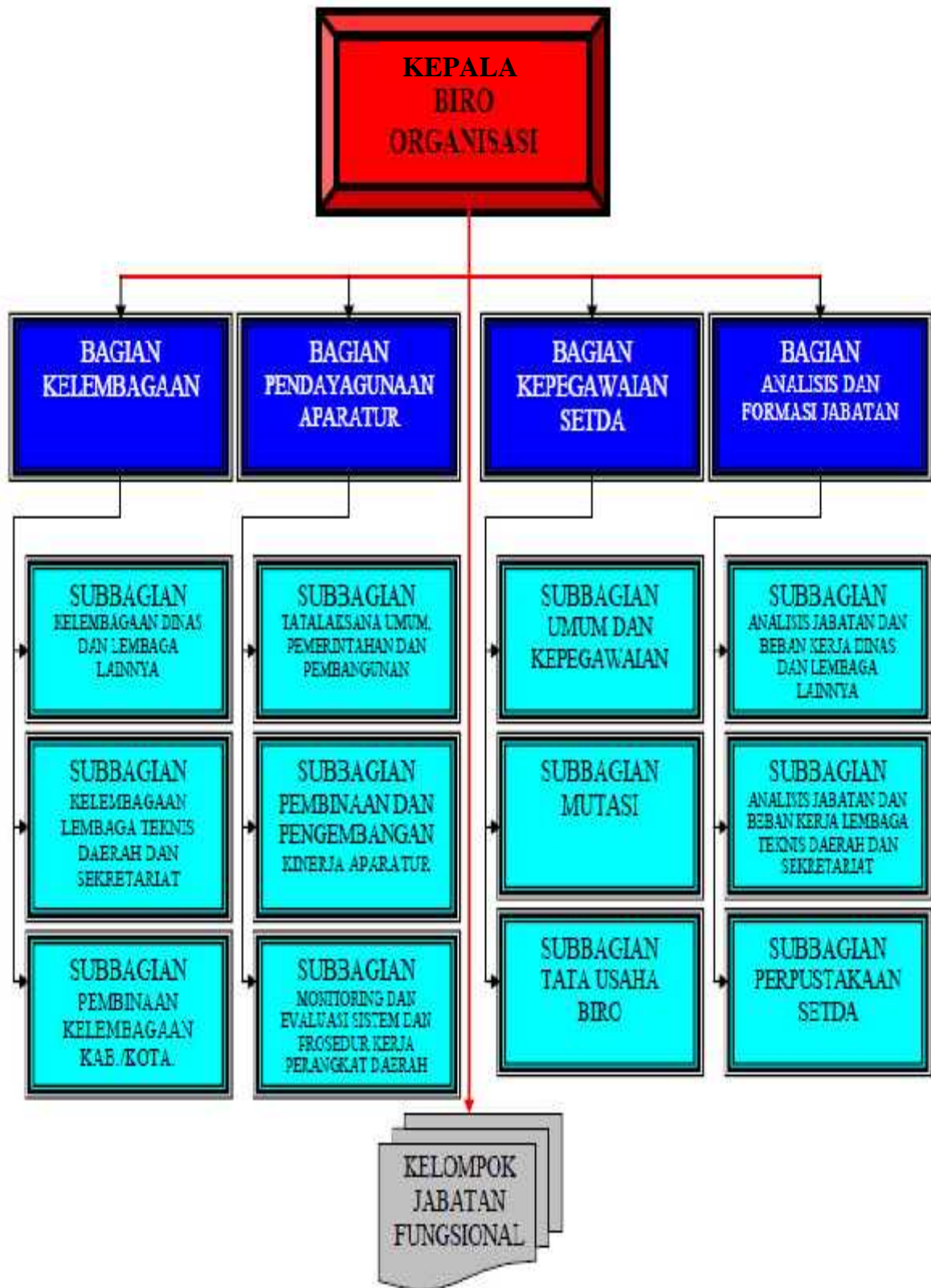
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, tugas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja aparatur serta melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian Setda sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kegiatan akuntabilitas kinerja.
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kinerja aparatur dan kegiatan analisis jabatan.
3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Biro Organisasi yang sebelumnya mempunyai tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Hukum, Semenjak bulan Februari 2008 tugas dan fungsinya dipisahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008.

STRUKTUR BIRO ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Biro Organisasi

**DAFTAR : REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI
KEADAAN : MEI 2012**

NO	KETERANGAN PEGAWAI	GOLONGAN IV					JML	GOLONGAN III				JML	GOLONGAN II				JML	GOLONGAN I				JML	TO TAL
		A	B	C	D	E		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A.	PEJABAT STRUKTURAL																						
√	JUMLAH	3	1				4			6	7	13											17
B.	PEJABAT FUNGSIONAL																						
√	JUMLAH																						
C.	PELAKSANA/ STAF																						
√	JUMLAH							9	9			18	1	6	4	1	12						30
D.	CPNS (CAPEG)																						
√	JUMLAH																						
	JUMLAH KESELURUHAN	3	1				4	9	9	6	7	31	1	6	4	1	12						47

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Organisasi

Biro Organisasi memberikan pelayanan terhadap aparatur baik bersifat Konsultasi, Koordinasi maupun Fasilitasi baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Didalam memberikan Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi terdiri beberapa bagian antara lain :

- Pada Bagian Pendayagunaan Aparatur memberikan pelayanan yang terkait dengan Penyusunan LAKIP, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Aspek Tata Pemerintahan yang baik lainnya.
- Bagian Kepegawaian Setda secara rutin melayani pengawasan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Proses-proses Administrasi Kepegawaian yang ditangani diantaranya adalah : Usul Kenaikan Pangkat, Kepengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Kepengurusan Karpeg dan Karis/Karsu, Kepengurusan Hak Cuti PNS dilingkup Setda Provinsi Jambi dan lain-lain. Didalam Pemrosesan Administrasi Kepegawaian bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

- Selanjutnya pada Bagian Kelembagaan memberikan Pelayanan Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi SKPD Provinsi dalam upaya menyusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran atau Right Sizing. Fasilitasi OPD juga ditujukan bagi SKPD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
- Demikian juga halnya dengan bagian Analisis Formasi Jabatan, bagian ini memberikan Pelayanan Konsultasi, Koordinasi serta Fasilitasi terhadap Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penetapan Jabatan Fungsional di seluruh SKPD Provinsi Jambi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Biro Organisasi dalam mewujudkan Pelayanan Aparatur adalah *Mind Set* dan *Culture Set* aparatur itu sendiri. Masih adanya aparatur yang merasa minta dilayani bukan melayani, menganggap pengguna jasa layanan sebagai pemohon bukan pelanggan, tidak merasa dikontrol dan sebagainya.

Sebaliknya jika tantangan tersebut dapat diatasi maka muncul peluang akan terwujudnya aparatur yang professional yang mampu mewujudkan pelayanan prima. Aparatur yang professional tersebut di indikasikan dengan apartur yang melayani, mendorong perubahan, mempermudah urusan, meyelenggarakan prosedur, terbuka dan merasa punya tanggung jawab. Kondisi aparatur yang demikian dibutuhkan dalam menerapkan reformasi birokrasi menuju Jambi Emas 2015.

BAB III

ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diperdagangkan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Instrumen utama yang digunakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (strength, weaknesses, opportunity, and threat). Pada pokoknya, tehnik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

3.1. Identifikasi Permasalahan pada Biro Organisasi

Jika ditinjau dari lingkungan internal, terdapat beberapa kekuatan yang dapat menjadi pendorong terwujudnya kinerja Biro Organisasi, Setda Provinsi Jambi, antara lain :

- Tersedianya dana;
- Sumber daya manusia yang memadai;
- Sistem organisasi yang solid;
- Sarana penunjang kegiatan perkerjaan yang relatif lengkap;
- Eksistensi Biro Organisasi yang strategis.

Sebaliknya, terdapat beberapa kelemahan yang dapat menjadi penghambat atau permasalahan bagi Biro Organisasi sehingga perlu diminimalisir supaya menjadi pendukung terwujudnya kinerja Biro Organisasi, Setda Provinsi Jambi, antara lain :

- Pelaksanaan koordinasi relatif sulit;
- Kendaraan operasional terbatas;
- Sering terjadi pergantian pimpinan.

Sedangkan jika ditinjau dari lingkungan eksternal, terdapat beberapa peluang yang perlu ditangkap guna mewujudkan kinerja Biro Organisasi, Setda Provinsi Jambi, antara lain :

- Pembinaan Kabupaten/Kota;
- Kontinue pemberdayaan pihak ketiga;
- Program/kegiatan didukung oleh pemerintah;
- Peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Sebaliknya, terdapat beberapa ancaman yang perlu diminimalisir guna mewujudkan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, antara lain :

- Pihak luar kurang mengetahui eksistensi Biro Organisasi;
- Lembaga luar sering lebih berkompeten dalam melaksanakan kegiatan internal.

Setelah hasil analisis SWOT dilakukan yang menghasilkan faktor-faktor internal (kekuatan/Strengths dan kelemahan/Weaknesses) dan eksternal (peluang/Opportunities dan Ancaman/Threats), maka berdasarkan hasil tersebut digunakan untuk menentukan strategi-strategi, yaitu :

1. Strategi SO dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan(S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.
2. Strategi WO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
3. Strategi ST yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).
4. Strategi WT yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan Menghindari ancaman (T).

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor SWOT diatas ditetapkan strategi-strategi seperti dibawah ini :

Faktor- faktor Internal	(S) Strengths/Kekuatan	(W) Weaknesses / Kelemahan
Faktor-faktor Eksternal		
(O) Opportunities/ Peluang	STRATEGI SO : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.	STRATEGI WO : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
(T) Threats/Ancaman	STRATEGI ST : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)	STRATEGI WT : Mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011 – 2015

Visi :

“TERWUJUDNYA EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA (JAMBI EMAS)”

Misi :

- Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum;
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya;
- Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri;
- Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan;
- Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender

Program :

- Pembangunan dan rehabilitasi jalan
- Pembangunan saluran drainase (perkotaan)
- Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Jalan produksi)
- Pengembangan perumahan (Bedah Rumah)
- Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi)
- Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin (Jamkesmasda)
- Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Evaluasi Kinerja SKPD)
- Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Membuka lapangan Pekerjaan (Pro Job)
- Menurunkan Angka Kemiskinan (Pro Poor)
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Pro growth)

Permasalahan :

Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program Single Identification Number (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan Negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan Negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi Pengawas Internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.

Disamping permasalahan tersebut diatas, budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, menciptakan untuk berpretasi, kejujuran, rasa tanggung jawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Disamping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum dapat dilaksanakan. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrument yang efektif untuk mencegah praktek KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

Meskipun telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Para Investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih terkendala dengan berbagai regulasi, sistem pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.

Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga penanganan pengaduan seperti “**Ombudsman Daerah**”.

Kinerja Birokrasi belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Pada tahun 2009 saja, terdapat 2.038 kasus pidana, 47 pidana korupsi, dan 349 kasus perdata.

Disisi lain upaya pendidikan Hukum dan HAM serta koordinasi penegakan HAM skala provinsi, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi terhadap pemerintah masih belum berjalan optimal. demikian juga dengan kinerja Panpel RANHAM provinsi dan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.

3.3 Isu-isu Strategis

- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan
- Ketahanan Pangan
- Infrastruktur
- Iklim investasi dan Iklim Usaha
- Energi
- Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- Daerah Tertinggal, terdepan, tertular dan pasca konflik
- Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
- Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Bidang Perekonomian
- Bidang Kesejahteraan Rakyat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

1. Visi Biro Organisasi

Visi suatu organisasi akan memberi kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya, yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, adatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah Provinsi Jambi, Biro Organisasi menetapkan visi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, yaitu : **“Terwujudnya kelembagaan yang dinamis, pelayanan administratif yang prima serta kinerja aparatur yang handal”**.

2. Misi Biro Organisasi

Misi merupakan pernyataan umum yang merumuskan tujuan inti organisasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan didalam visi. Untuk itu, misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Pelayanan Administratif yang Prima dalam memberikan pelayanan Aparatur kepada seluruh perangkat pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur guna mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tangguh, handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan perkuatan kemandirian otonomi Provinsi Jambi.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang berkualitas dan tangguh di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
5. Melaksanakan analisis formasi jabatan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menempatkan aparatur pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi serta kepustakaan yang handal dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca aparatur.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran (Tahun)				
				2011	2012	2013	2014	2015
a.	Meningkatkan Kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang handal dan tangguh di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.	Terwujudnya Kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang handal dan tangguh di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.	- Persentase peningkatan kualitas SDM Sekretariat Daerah	7.5	10	12.5	15	20
			- Jumlah aparatur Setda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Org	35 Org	40 Org	45 Org	50 Org
			- Persentase peningkatan kualitas pelayanan aparatur di lingkungan Setda Prov. Jambi	30	35	40	45	50
b.	Mewujudkan penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	Terwujudnya Penempatan Aparatur yang Efektif dan Tepat Sasaran	- Persentase Jumlah Aparatur yang menduduki jabatan sesuai kompetensi dan pengalaman kerja	80	85	100	100	100
			- Persentase peningkatan jumlah tenaga fungsional di SKPD Prov. Jambi	85	90	100	100	100
c.	Meningkatkan Sistem Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.	Terwujudnya Sistem Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik	- Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas SKPD Prov. Jambi	CC	CC	B	B	B
			- Persentase sumber daya SKPD yang mampu menyusun LAKIP	40	60	70	80	90
			- Persentase pemanfaatan data dan informasi LAKIP Provinsi Jambi	20	25	30	35	40
			- Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas Pemerintah Prov. Jambi	C	CC	CC	B	B
d.	Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tangguh, handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan perkuatan kemandirian otonomi Provinsi	Terwujudnya kelembagaan yang Efktif dan Efisien	- Efisiensi kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi	1 Perda 1 Pergub	3Perda 3 Pergub	3 Perda 1 Pergub	1 Perda 1 Pergub	1 Perda 1 Pergub
			- Efisiensi kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	8 Ranpergub	11 Kab/Kota	11 Ranpergub	11 Ranpergub
e.	Terwujudnya analisis formasi jabatan serta kepustakaan yang handal dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca aparatur	Terwujudnya Kepustakaan yang handal	- Persentase perkembangan tenaga fungsional teknis di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi					
			- Jumlah Pergub tentang Instrumen Analisis Jabatan					
			- Jumlah Pergub tentang Jabatan Fungsional Teknis					
			- Persentase penambahan jumlah koleksi perpustakaan Setda Provinsi Jambi	20	25	30	35	40
			- Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	15	20	15	15	15

4.2 Tujuan dan Sasaran (spesifik,teratur, dapat dicapai dan waktu)

Tujuan yang Ingin Dicapai :

1. Tujuan

Bertolak dari Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan sebagai berikut :

“Terlaksananya pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan yang handal, tangguh dan dinamis serta memberikan pelayanan aparatur kepada seluruh jajaran pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.”

2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat di cap dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah :

- a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang handal dan tangguh di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
- b. Terwujudnya penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Terwujudnya Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik.
- d. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tangguh,handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan perkuatan kemandirian otonomi Provinsi Jambi.
- e. Terwujudnya analisis formasi jabatan serta kepustakaan yang handal dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca aparatur.

4.3 Strategi (konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif)

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas Biro Organisasi, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Organisasi menerapkan strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup vertikal, horizontal dan botom-up. Kerjasama dimaksud mencakup sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan.

4.4 Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk Tahun 2009 antara lain :

- a. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
- b. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Lampiran A VII, yaitu kode dan daftar program dan kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

I. Program Penguatan Kelembagaan, Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi
2. Pembinaan OPD Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi (rakor OPD Kabupaten/Kota)
3. Evaluasi UPTD/B lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan, Peningkatan, Pengembangan, serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Budaya Kerja Provinsi Jambi

III. Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan :

1. Penyusunan, Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Jambi
2. Penyusunan, Evaluasi, Penerapan Pergub Pakaian Dinas PNS, Pergub Hubungan Kerja, dan Pergub Tata Naskah Dinas
3. Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan E-Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
4. Koordinasi Pembinaan Pelayanan Publik dan Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik
5. Pelaksanaan Survei IKM pada Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Evaluasi Penerapan IKM Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik, Workshop Pengisian Form LHKPN, dan Penandatanganan Pakta Integritas
7. Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (SKPD Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota)
8. Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten/Kota
9. Rakor Pendayagunaan Aparatur se-Provinsi Jambi
10. Pelaksanaan dan Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi tahun 2013 – 2017, dan Evaluasi RB Kabupaten/Kota
11. Pembinaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Pelaksanaan SPM Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.

IV. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan :

1. Pengkajian/rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Tugas Wewenang dan Kewajibannya

V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
2. Pembinaan dan Proses Seleksi Administrasi Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah
3. Pembuatan Data Base Kepegawaian Setda Provinsi Jambi

VI. Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur

Kegiatan :

1. Kontribusi, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis

VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan :

1. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
2. Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan Analisis Beban Kerja
3. Penataan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI TAHUN 2011-2015

Dalam upaya melaksanakan tugas secara efektif dan efisien guna membantu Sekretaris Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Indikator tersebut berkaitan dengan fungsi yang akan dijalankan oleh Biro Organisasi, menyangkut beberapa komponen antara lain :

- a. Pelaksanaan administratif dan kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kegiatan akuntabilitas kinerja.
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan di bidang pengembangan kinerja aparatur dan kegiatan analisis jabatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan kegiatan Tata Usaha Biro.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

No	Sasaran	IKU	Alasan/ Sumber Data
a.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang handal dan tangguh di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kualitas SDM Sekretariat Daerah - Jumlah aparatur Setda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan - Persentase peningkatan kualitas pelayanan aparatur di lingkungan Setda Prov. Jambi 	RPJMD dan Renstra Biro Organisasi
b.	Terwujudnya penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Aparatur yang menduduki jabatan sesuai kompetensi dan pengalaman kerja - Persentase peningkatan jumlah tenaga fungsional di SKPD Prov. Jambi 	RPJMD dan Renstra Biro Organisasi
c.	Terwujudnya Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas SKPD Prov. Jambi - Jumlah sumber daya SKPD yang mampu menyusun LAKIP - Persentase pemanfaatan data dan informasi LAKIP Provinsi Jambi - Jumlah sumber daya Pemda kabupaten/kota yang mampu menyusun LAKIP 	RPJMD dan Renstra Biro Organisasi
d.	Terwujudnya kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi kelembagaan Pemerintah Provinsi 	RPJMD dan

e.	<p>dan ketatalaksanaan yang tangguh, handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan perkuatan kemandirian otonomi Provinsi</p> <p>Terwujudnya analisis formasi jabatan serta kepastakaan yang handal dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca aparatur</p>	<p>Jambi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota - Persentase perkembangan tenaga fungsional teknis di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi - Jumlah Pergub tentang Instrumen Analisis Jabatan - Jumlah Pergub tentang Jabatan Fungsional Teknis - Persentase penambahan jumlah koleksi perpustakaan Setda Provinsi Jambi - Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan 	<p>Renstra Biro Organisasi</p> <p>RPJMD dan Renstra Biro Organisasi</p>
----	--	---	---

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2011 – 2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi 2011 – 2015 tentunya akan diwujudkan dengan dukungan dari seluruh Stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS



RENCANA STRATEGIS
BIRO ORGANISASI
TAHUN 2011 - 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2010

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan ketatalaksanaan. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka salah satu prinsip yang harus dikembangkan adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015 disusun dengan mempedomani beberapa aturan normatif, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015.

Sesuai dengan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, diharapkan Rencana Strategis ini dapat mendukung program-program yang telah ditetapkan Biro Organisasi yang berorientasi pada penyiapan kebijakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan SKPD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi serta fasilitasi dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselesainya Rencana Strategis ini. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas outcome Biro Organisasi, maka rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai bagian dari skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai pedoman rencana kerja tahunan Biro, seluruh Bagian dan Sub bagian lingkup Biro Organisasi.

Jambi, Januari 2012
Kepala Biro Organisasi

dto

Ir. AKHDIYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600826 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika penulisan Rencana Strategi.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BIRO ORGANISASI	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Biro Organisasi	7
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Organisasi	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	9
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI	11
3.1 Identifikasi Permasalahan pada Biro Organisasi	11
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011 - 2015	12
3.3 Isu - isu Strategis	15
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	16
4.1 Visi dan Misi	16
4.2 Tujuan dan Sasaran	18
4.3 Strategi	18
4.4 Kebijakan	18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	19
BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI	21
BAB VII PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

**NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-
2/2012**

TANGGAL : 2012

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Secara Geografis Provinsi Jambi mempunyai luas 53.435 Km² dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 2.788.269 jiwa yang tersebar pada 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 52,18 orang/Km² (Jambi Dalam Angka, 2008). Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota. Terdapat 131 Kecamatan, 1.179 Desa dan 150 Kelurahan yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Gambaran Makro Ekonomi Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi yang terus meningkat mencapai 7,16 % di Tahun 2008 (Jambi Dalam Angka, 2008). Hal ini seiring dengan perkembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi sangat Potensial dan Prospektif, hal ini mengingat secara fundamental Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan. Jumlah Koperasi di Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebanyak 2.578 unit, tahun 2006 sebanyak 2.668 unit, tahun 2007 sebanyak 2.717 unit, tahun 2008 sebanyak 2.972 unit dan tahun 2009 sebanyak 3.155 unit. Sedangkan Jumlah UMKM binaan pada tahun 2006 sebanyak 11.605, tahun 2007 sebanyak 17.604 unit, tahun 2008 sebanyak 17.476 dan tahun 2009 sebanyak 18.555 unit. Sehingga total jumlah UMKM Binaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 65.240 unit.

Masing-masing Kabupaten/Kota tersebut pada prinsipnya telah mempunyai perangkat organisasi yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM. Setiap organisasi memerlukan perencanaan ke depan dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang akan menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan Kinerja Organisasi. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun ke depan.

Idealnya, penyusunan Renstra harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul pada proses Implementasi 5 Tahun berikutnya. Rencana Strategis, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga didalamnya Renstra mengandung komponen-komponen antara lain Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang paling meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis.

Dengan demikian, Biro Organisasi sebagai bagian dari Sistem di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi harus menyusun Renstra tahun 2011 – 2015 sebagai wujud implementasi amanat diatas. Renstra Biro Organisasi adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dipedomani oleh Biro Organisasi dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan daerah Renstra Biro Organisasi yang telah disusun dengan mempedomani RPJMD atau merupakan penjabaran teknis dan RPJMD, maka kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Terdapat bebarapa aturan normatif yang dapat dijadikan landasan hukum penyusunan Renstra Biro Organisasi sebagi berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 39/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
9. Peraturan Gubernur Jambi No. 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi ini adalah memberikan indikator dalam penilaian capaian kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi selama periode 2011 – 2015.

Tujuan Penyusunan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi ini adalah memberikan pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja yang memuat Visi, Misi, Gambaran umum pelayanan, Capaian indikator dan Program selama lima tahun kedepan terhitung mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015. Disamping itu, Renstra ini juga merupakan bahan untuk penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Setda Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

Sesuai dengan Kisi-kisi Penyusunan Renstra SKPD dalam rangka penyusunan RPJMD Tahap ke-2, maka Sistematis Penulisan Rencana Strategis ini terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematis Penulisan Rencana Strategis

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Biro Organisasi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Organisasi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Organisasi
- 3.2 Telaahan Renstra Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah 2011 – 2015
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran
- 4.3 Strategi
- 4.4 Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BABVI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BIRO ORGANISASI

Biro Organisasi sebagai salah satu unit kerja yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD Provinsi Jambi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Biro Organisasi

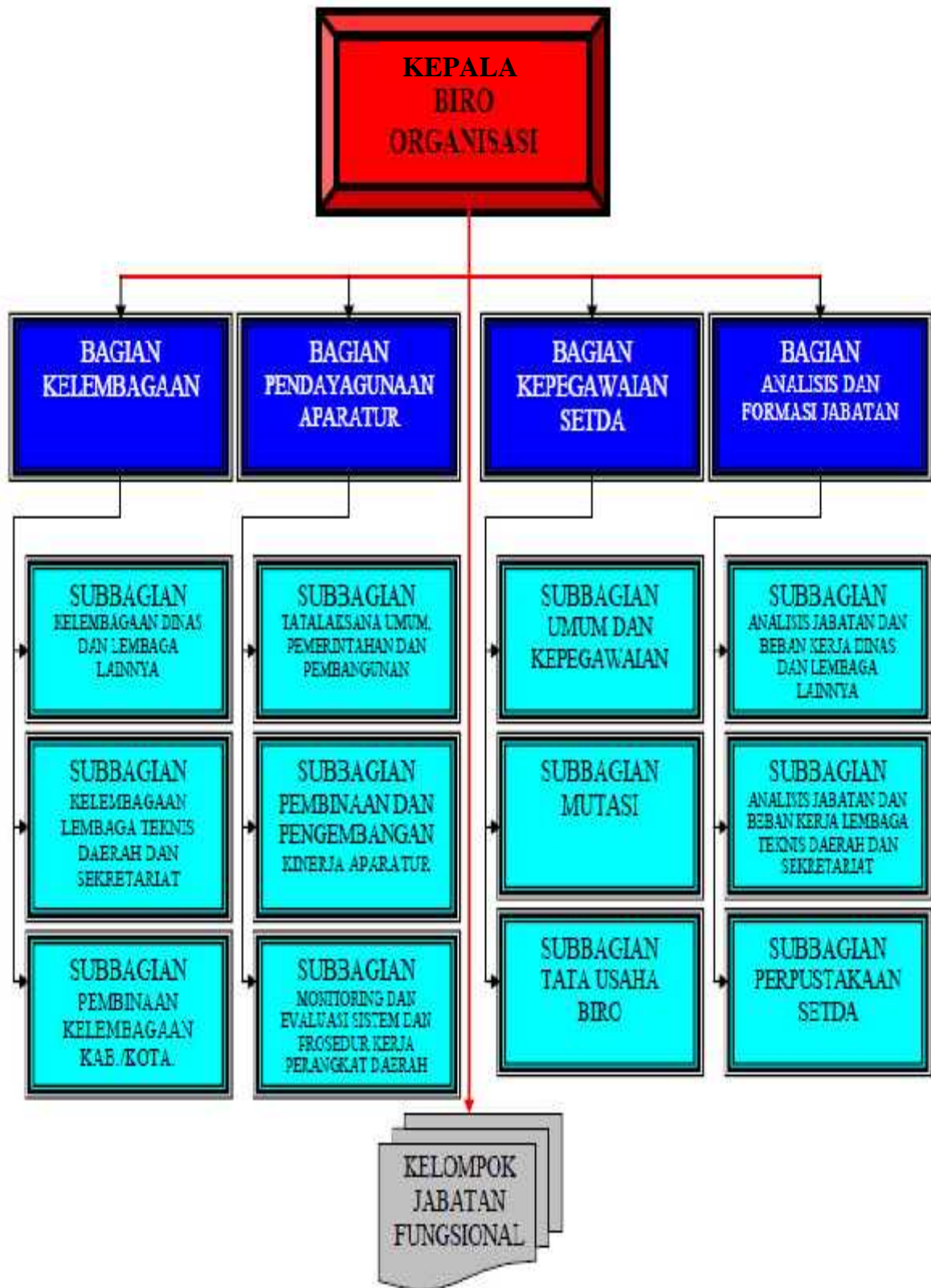
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, tugas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jambi adalah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan bidang organisasi, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja aparatur serta melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian Setda sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Biro Organisasi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kegiatan akuntabilitas kinerja.
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kinerja aparatur dan kegiatan analisis jabatan.
3. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Biro Organisasi yang sebelumnya mempunyai tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Hukum, Semenjak bulan Februari 2008 tugas dan fungsinya dipisahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008.

STRUKTUR BIRO ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Biro Organisasi

**DAFTAR : REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI
KEADAAN : MEI 2012**

NO	KETERANGAN PEGAWAI	GOLONGAN IV					JML	GOLONGAN III				JML	GOLONGAN II				JML	GOLONGAN I				JML	TO TAL
		A	B	C	D	E		A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A.	PEJABAT STRUKTURAL																						
√	JUMLAH	3	1				4			6	7	13											17
B.	PEJABAT FUNGSIONAL																						
√	JUMLAH																						
C.	PELAKSANA/ STAF																						
√	JUMLAH							9	9			18	1	6	4	1	12						30
D.	CPNS (CAPEG)																						
√	JUMLAH																						
	JUMLAH KESELURUHAN	3	1				4	9	9	6	7	31	1	6	4	1	12						47

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Organisasi

Biro Organisasi memberikan pelayanan terhadap aparatur baik bersifat Konsultasi, Koordinasi maupun Fasilitasi baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Didalam memberikan Pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi terdiri beberapa bagian antara lain :

- Pada Bagian Pendayagunaan Aparatur memberikan pelayanan yang terkait dengan Penyusunan LAKIP, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Aspek Tata Pemerintahan yang baik lainnya.
- Bagian Kepegawaian Setda secara rutin melayani pengawasan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Proses-proses Administrasi Kepegawaian yang ditangani diantaranya adalah : Usul Kenaikan Pangkat, Kepengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Kepengurusan Karpeg dan Karis/Karsu, Kepengurusan Hak Cuti PNS dilingkup Setda Provinsi Jambi dan lain-lain. Didalam Pemrosesan Administrasi Kepegawaian bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

- Selanjutnya pada Bagian Kelembagaan memberikan Pelayanan Konsultasi, Koordinasi dan Fasilitasi SKPD Provinsi dalam upaya menyusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran atau Right Sizing. Fasilitasi OPD juga ditujukan bagi SKPD Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi
- Demikian juga halnya dengan bagian Analisis Formasi Jabatan, bagian ini memberikan Pelayanan Konsultasi, Koordinasi serta Fasilitasi terhadap Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penetapan Jabatan Fungsional di seluruh SKPD Provinsi Jambi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Biro Organisasi dalam mewujudkan Pelayanan Aparatur adalah *Mind Set* dan *Culture Set* aparatur itu sendiri. Masih adanya aparatur yang merasa minta dilayani bukan melayani, menganggap pengguna jasa layanan sebagai pemohon bukan pelanggan, tidak merasa dikontrol dan sebagainya.

Sebaliknya jika tantangan tersebut dapat diatasi maka muncul peluang akan terwujudnya aparatur yang professional yang mampu mewujudkan pelayanan prima. Aparatur yang professional tersebut di indikasikan dengan apartur yang melayani, mendorong perubahan, mempermudah urusan, meyelenggarakan prosedur, terbuka dan merasa punya tanggung jawab. Kondisi aparatur yang demikian dibutuhkan dalam menerapkan reformasi birokrasi menuju Jambi Emas 2015.

BAB III

ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai keadaan faktor-faktor lingkungan strategis organisasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta mencermati peluang pendorong dan ancaman guna menentukan faktor kunci keberhasilan yang diperdagangkan dan akan diperbaiki dalam mencapai sasaran.

Instrumen utama yang digunakan dalam mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (strength, weaknesses, opportunity, and threat). Pada pokoknya, tehnik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

3.1. Identifikasi Permasalahan pada Biro Organisasi

Jika ditinjau dari lingkungan internal, terdapat beberapa kekuatan yang dapat menjadi pendorong terwujudnya kinerja Biro Organisasi, Setda Provinsi Jambi, antara lain :

- Tersedianya dana;
- Sumber daya manusia yang memadai;
- Sistem organisasi yang solid;
- Sarana penunjang kegiatan perkerjaan yang relatif lengkap;
- Eksistensi Biro Organisasi yang strategis.

Sebaliknya, terdapat beberapa kelemahan yang dapat menjadi penghambat atau permasalahan bagi Biro Organisasi sehingga perlu diminimalisir supaya menjadi pendukung terwujudnya kinerja Biro Organisasi, Setda Provinsi Jambi, antara lain :

- Pelaksanaan koordinasi relatif sulit;
- Kendaraan operasional terbatas;
- Sering terjadi pergantian pimpinan.

Sedangkan jika ditinjau dari lingkungan eksternal, terdapat beberapa peluang yang perlu ditangkap guna mewujudkan kinerja Biro Organisasi, Setda Provinsi Jambi, antara lain :

- Pembinaan Kabupaten/Kota;
- Kontinue pemberdayaan pihak ketiga;
- Program/kegiatan didukung oleh pemerintah;
- Peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Sebaliknya, terdapat beberapa ancaman yang perlu diminimalisir guna mewujudkan kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, antara lain :

- Pihak luar kurang mengetahui eksistensi Biro Organisasi;
- Lembaga luar sering lebih berkompeten dalam melaksanakan kegiatan internal.

Setelah hasil analisis SWOT dilakukan yang menghasilkan faktor-faktor internal (kekuatan/Strengths dan kelemahan/Weaknesses) dan eksternal (peluang/Opportunities dan Ancaman/Threats), maka berdasarkan hasil tersebut digunakan untuk menentukan strategi-strategi, yaitu :

1. Strategi SO dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan(S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.
2. Strategi WO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
3. Strategi ST yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).
4. Strategi WT yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan Menghindari ancaman (T).

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor SWOT diatas ditetapkan strategi-strategi seperti dibawah ini :

Faktor- faktor Internal	(S) Strengths/Kekuatan	(W) Weaknesses / Kelemahan
Faktor-faktor Eksternal		
(O) Opportunities/ Peluang	STRATEGI SO : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.	STRATEGI WO : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.
(T) Threats/Ancaman	STRATEGI ST : Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)	STRATEGI WT : Mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011 – 2015

Visi :

“TERWUJUDNYA EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA (JAMBI EMAS)”

Misi :

- Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum;
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya;
- Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri;
- Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan;
- Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender

Program :

- Pembangunan dan rehabilitasi jalan
- Pembangunan saluran drainase (perkotaan)
- Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Jalan produksi)
- Pengembangan perumahan (Bedah Rumah)
- Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi)
- Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin (Jamkesmasda)
- Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Evaluasi Kinerja SKPD)
- Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Membuka lapangan Pekerjaan (Pro Job)
- Menurunkan Angka Kemiskinan (Pro Poor)
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Pro growth)

Permasalahan :

Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program Single Identification Number (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan Negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.

Upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga masih terkendala oleh belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan Negara dan pengawasannya. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi Pengawas Internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.

Disamping permasalahan tersebut diatas, budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi. Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (*code of conduct*) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, menciptakan untuk berpretasi, kejujuran, rasa tanggung jawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Disamping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan *e-procurement* belum dapat dilaksanakan. Padahal, pengembangan dan penerapan *e-procurement* merupakan instrument yang efektif untuk mencegah praktek KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

Meskipun telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Para Investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih terkendala dengan berbagai regulasi, sistem pelayanan investasi dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan investasi.

Sebagian besar unit pelayanan publik belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga penanganan pengaduan seperti “**Ombudsman Daerah**”.

Kinerja Birokrasi belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang efisien dan belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Pada tahun 2009 saja, terdapat 2.038 kasus pidana, 47 pidana korupsi, dan 349 kasus perdata.

Disisi lain upaya pendidikan Hukum dan HAM serta koordinasi penegakan HAM skala provinsi, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi terhadap pemerintah masih belum berjalan optimal. demikian juga dengan kinerja Panpel RANHAM provinsi dan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.

3.3 Isu-isu Strategis

- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
- Pendidikan
- Kesehatan
- Penanggulangan Kemiskinan
- Ketahanan Pangan
- Infrastruktur
- Iklim investasi dan Iklim Usaha
- Energi
- Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- Daerah Tertinggal, terdepan, tertular dan pasca konflik
- Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
- Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Bidang Perekonomian
- Bidang Kesejahteraan Rakyat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

1. Visi Biro Organisasi

Visi suatu organisasi akan memberi kontribusi suatu organisasi pada pencapaian tujuan. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya, yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, adatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah Provinsi Jambi, Biro Organisasi menetapkan visi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, yaitu : **“Terwujudnya kelembagaan yang dinamis, pelayanan administratif yang prima serta kinerja aparatur yang handal“**.

2. Misi Biro Organisasi

Misi merupakan pernyataan umum yang merumuskan tujuan inti organisasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan didalam visi. Untuk itu, misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Pelayanan Administratif yang Prima dalam memberikan pelayanan Aparatur kepada seluruh perangkat pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur guna mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tangguh, handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan perkuatan kemandirian otonomi Provinsi Jambi.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang berkualitas dan tangguh di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
5. Melaksanakan analisis formasi jabatan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menempatkan aparatur pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi serta kepustakaan yang handal dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca aparatur.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran (Tahun)				
				2011	2012	2013	2014	2015
a.	Meningkatkan Kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang handal dan tangguh di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.	Terwujudnya Kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang handal dan tangguh di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.	- Persentase peningkatan kualitas SDM Sekretariat Daerah	7.5	10	12.5	15	20
			- Jumlah aparatur Setda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Org	35 Org	40 Org	45 Org	50 Org
			- Persentase peningkatan kualitas pelayanan aparatur di lingkungan Setda Prov. Jambi	30	35	40	45	50
b.	Mewujudkan penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	Terwujudnya Penempatan Aparatur yang Efektif dan Tepat Sasaran	- Persentase Jumlah Aparatur yang menduduki jabatan sesuai kompetensi dan pengalaman kerja	80	85	100	100	100
			- Persentase peningkatan jumlah tenaga fungsional di SKPD Prov. Jambi	85	90	100	100	100
c.	Meningkatkan Sistem Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.	Terwujudnya Sistem Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik	- Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas SKPD Prov. Jambi	CC	CC	B	B	B
			- Persentase sumber daya SKPD yang mampu menyusun LAKIP	40	60	70	80	90
			- Persentase pemanfaatan data dan informasi LAKIP Provinsi Jambi	20	25	30	35	40
			- Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas Pemerintah Prov. Jambi	C	CC	CC	B	B
d.	Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tangguh, handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan perkuatan kemandirian otonomi Provinsi	Terwujudnya kelembagaan yang Efktif dan Efisien	- Efisiensi kelembagaan Pemerintah Provinsi Jambi	1 Perda 1 Pergub	3Perda 3 Pergub	3 Perda 1 Pergub	1 Perda 1 Pergub	1 Perda 1 Pergub
			- Efisiensi kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	8 Ranpergub	11 Kab/Kota	11 Ranpergub	11 Ranpergub
e.	Terwujudnya analisis formasi jabatan serta kepustakaan yang handal dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca aparatur	Terwujudnya Kepustakaan yang handal	- Persentase perkembangan tenaga fungsional teknis di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi					
			- Jumlah Pergub tentang Instrumen Analisis Jabatan					
			- Jumlah Pergub tentang Jabatan Fungsional Teknis					
			- Persentase penambahan jumlah koleksi perpustakaan Setda Provinsi Jambi	20	25	30	35	40
			- Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	15	20	15	15	15

4.2 Tujuan dan Sasaran (spesifik,teratur, dapat dicapai dan waktu)

Tujuan yang Ingin Dicapai :

1. Tujuan

Bertolak dari Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan sebagai berikut :

“Terlaksananya pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, organisasi dan ketatalaksanaan yang handal, tangguh dan dinamis serta memberikan pelayanan aparatur kepada seluruh jajaran pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.”

2. Sasaran

Untuk mencapai hasil secara nyata oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat di cap dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi adalah :

- a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang handal dan tangguh di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
- b. Terwujudnya penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Terwujudnya Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik.
- d. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang tangguh,handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan perkuatan kemandirian otonomi Provinsi Jambi.
- e. Terwujudnya analisis formasi jabatan serta kepustakaan yang handal dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca aparatur.

4.3 Strategi (konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif)

Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal, untuk pelaksanaan tugas Biro Organisasi, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Organisasi menerapkan strategi kerjasama. Pola kerjasama yang dilaksanakan mencakup vertikal, horizontal dan botom-up. Kerjasama dimaksud mencakup sumber daya aparatur dan keuangan dengan lembaga terkait dalam bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan.

4.4 Kebijakan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi telah disusun langkah-langkah kebijakan untuk Tahun 2009 antara lain :

- a. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta kinerja aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat dan aparatur.
- b. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Lampiran A VII, yaitu kode dan daftar program dan kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

I. Program Penguatan Kelembagaan, Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan :

1. Pembinaan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi
2. Pembinaan OPD Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi (rakor OPD Kabupaten/Kota)
3. Evaluasi UPTD/B lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan, Peningkatan, Pengembangan, serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Budaya Kerja Provinsi Jambi

III. Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kegiatan :

1. Penyusunan, Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Jambi
2. Penyusunan, Evaluasi, Penerapan Pergub Pakaian Dinas PNS, Pergub Hubungan Kerja, dan Pergub Tata Naskah Dinas
3. Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan E-Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
4. Koordinasi Pembinaan Pelayanan Publik dan Pengembangan Kualitas Aparatur Pelayanan Publik
5. Pelaksanaan Survei IKM pada Unit Pelayanan Publik Provinsi dan Evaluasi Penerapan IKM Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik, Workshop Pengisian Form LHKPN, dan Penandatanganan Pakta Integritas
7. Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (SKPD Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota)
8. Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten/Kota
9. Rakor Pendayagunaan Aparatur se-Provinsi Jambi
10. Pelaksanaan dan Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi tahun 2013 – 2017, dan Evaluasi RB Kabupaten/Kota
11. Pembinaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Pelaksanaan SPM Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota.

IV. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan :

1. Pengkajian/rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Tugas Wewenang dan Kewajibannya

V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
2. Pembinaan dan Proses Seleksi Administrasi Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah
3. Pembuatan Data Base Kepegawaian Setda Provinsi Jambi

VI. Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur

Kegiatan :

1. Kontribusi, Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan Teknis

VII. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan :

1. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
2. Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan Analisis Beban Kerja
3. Penataan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI TAHUN 2011-2015

Dalam upaya melaksanakan tugas secara efektif dan efisien guna membantu Sekretaris Daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

Indikator tersebut berkaitan dengan fungsi yang akan dijalankan oleh Biro Organisasi, menyangkut beberapa komponen antara lain :

- a. Pelaksanaan administratif dan kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kegiatan akuntabilitas kinerja.
- b. Penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan di bidang pengembangan kinerja aparatur dan kegiatan analisis jabatan.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan kegiatan Tata Usaha Biro.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

No	Sasaran	IKU	Alasan/ Sumber Data
a.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas sumber daya dan pelayanan Aparatur yang handal dan tangguh di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kualitas SDM Sekretariat Daerah - Jumlah aparatur Setda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan - Persentase peningkatan kualitas pelayanan aparatur di lingkungan Setda Prov. Jambi 	RPJMD dan Renstra Biro Organisasi
b.	Terwujudnya penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Aparatur yang menduduki jabatan sesuai kompetensi dan pengalaman kerja - Persentase peningkatan jumlah tenaga fungsional di SKPD Prov. Jambi 	RPJMD dan Renstra Biro Organisasi
c.	Terwujudnya Koordinasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan akuntabilitas dan peningkatan kinerja aparatur dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kualitas akuntabilitas SKPD Prov. Jambi - Jumlah sumber daya SKPD yang mampu menyusun LAKIP - Persentase pemanfaatan data dan informasi LAKIP Provinsi Jambi - Jumlah sumber daya Pemda kabupaten/kota yang mampu menyusun LAKIP 	RPJMD dan Renstra Biro Organisasi
d.	Terwujudnya kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi kelembagaan Pemerintah Provinsi 	RPJMD dan

e.	<p>dan ketatalaksanaan yang tangguh, handal dan dinamis dalam rangka perwujudan dan perkuatan kemandirian otonomi Provinsi</p> <p>Terwujudnya analisis formasi jabatan serta kepastakaan yang handal dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi dan peningkatan minat baca aparatur</p>	<p>Jambi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota - Persentase perkembangan tenaga fungsional teknis di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi - Jumlah Pergub tentang Instrumen Analisis Jabatan - Jumlah Pergub tentang Jabatan Fungsional Teknis - Persentase penambahan jumlah koleksi perpustakaan Setda Provinsi Jambi - Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan 	<p>Renstra Biro Organisasi</p> <p>RPJMD dan Renstra Biro Organisasi</p>
----	--	---	---

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2015 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2011 – 2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi 2011 – 2015 tentunya akan diwujudkan dengan dukungan dari seluruh Stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat.

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

4		Keg. Penyusunan, Peningkatan, Pengembangan, serta Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Budaya Kerja Provinsi Jambi	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi	Peningkatan nilai SAKIP Prov. Jambi	50,000,000	Predikat "C"	50,000,000	Predikat "CC"	50,000,000	Predikat "CC"	53,000,000	Predikat "B"	55,000,000	Predikat "B"														
					Peningkatan kualitas SAKIP Setda Prov. Jambi	15,000,000	tersusunnya 1 LAKIP Setda	15,000,000	tersusunnya 1 LAKIP Setda	15,000,000	tersusunnya 1 LAKIP Setda	15,000,000	tersusunnya 1 LAKIP Setda	15,000,000	1 LAKIP														
					Peningkatan kualitas SAKIP Biro Organisasi	2,500,000	tersusunnya LAKIP Biro Organisasi	3,000,000	tersusunnya LAKIP Biro Organisasi	3,000,000	tersusunnya LAKIP Biro Organisasi	3,000,000	tersusunnya LAKIP Biro Organisasi	3,000,000	tersusunnya LAKIP Biro Organisasi														
					Akuntabilitas kinerja Kab/Kota semakin meningkat	85,000,000	Pembinaan SAKIP 11 Kab/Kota mendapat predikat "CC"	85,000,000	Pembinaan SAKIP 11 Kab/Kota mendapat predikat "CC"	90,000,000	Pembinaan SAKIP 11 Kab/Kota mendapat predikat "CC"	90,000,000	Pembinaan SAKIP 11 Kab/Kota mendapat predikat "CC"	93,500,000	Pembinaan SAKIP 11 Kab/Kota mendapat predikat "CC"														
III	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terciptanya aparatur Provinsi Jambi yang berbudaya dalam bekerja	Sosialisasi, dan evaluasi penerapan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Jambi	20,000,000	1 Pergub, 1 kali sosialisasi & 1 LHE	-	-	-	-	25,000,000	1 Pergub, 1 kali sosialisasi & 1 LHE	25,000,000	1 Pergub, 1 kali sosialisasi & 1 LHE														
5																Penyusunan, sosialisasi penerapan budaya kerja Pemerintah Provinsi Jambi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik												
6																Penyusunan, evaluasi, penerapan Pergub pakaian dinas PNS, Pergub hubungan kerja, dan Pergub Tata Naskah Dinas	Peningkatan kedisiplinan PNS	Terciptanya kedisiplinan dan kesantunan dalam berpakaian dinas aparatur	Pelaksanaan evaluasi penerapan Pergub pakaian dinas ke 46 SKPD Provinsi Jambi	30,000,000	LHE penerapan Pergub pakaian dinas	-	-	-	1 Pergub & 1 kali sosialisasi Pergub pakaian dinas & Hubungan kerja	35,000,000	LHE penerapan Pergub pakaian dinas	35,500,000	LHE penerapan Pergub pakaian dinas
7																Sosialisasi dan evaluasi penerapan E-Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Tertatanya dokumen naskah dinas secara elektronik	1 kali pelaksanaan sosialisasi aplikasi dan evaluasi penerapan aplikasi tata naskah dinas elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000,000	1 kali sosialisasi
8	Kegiatan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparatur pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Unit pelayanan publik yang dibina mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna layanan	175,000,000	22	175,000,000	22	185,000,000	22	210,000,000	33	235,000,000	33															
9	Pelaksanaan survei IKM pada Unit Pelayanan Publik Provinsi dan evaluasi penerapan IKM Kab/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya unit pelayanan publik yang handal	Perbaikan dan peningkatan layanan pada 14 unsur pelayanan publik	55,000,000	4 survei IKM	65,500,000	4 survei IKM	60,000,000	3 survei IKM	75,000,000	3 survei IKM	85,000,000	6 survei IKM															

17		Kegiatan Penataan Administrasi Tata Usaha Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran lingkup Setda Provinsi Jambi	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran bagi PNS lingkup Setda Provinsi Jambi	Belanja barang dan jasa : Pembelian ATK, Cetak, Belanja Modal, Perjalanan Dinas	360,000,000	ATK : 4 paket, Cetak : 8 paket, Belanja Modal : 9 paket, Perjalanan Dinas : 3 kegiatan	365,000,000	ATK : 4 paket, Cetak : 8 paket, Belanja Modal : 9 paket, Perjalanan Dinas : 3 kegiatan	375,000,000	ATK : 4 paket, Cetak : 8 paket, Belanja Modal : 9 paket, Perjalanan Dinas : 3 kegiatan	425,000,000	ATK : 4 paket, Cetak : 8 paket, Belanja Modal : 9 paket, Perjalanan Dinas : 3 kegiatan	545,000,000	ATK : 1 paket, Cetak : 7 paket, Belanja Modal : 8 paket, Perjalanan Dinas : 2 kegiatan
18		Kegiatan pembinaan dan proses seleksi administrasi mutasi kepegawaian di Lingkungan Setda.	Mewujudkan administrasi mutasi kepegawaian lingkup Setda sesuai dengan kompetensi	Terwujudnya Administrasi Mutasi Kepegawaian lingkup Setda sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jlh PNS yang naik pangkat Jlh PNS yang naik gaji berkala Jlh usulan mutasi pindah PNS Jlh pengurusan Karis/Karsu Jlh usulan PNS Pensiun Jlh usulan CPNS ke PNS Jlh kepengurusan izin belajar	75,000,000	200 orang PNS 250 orang PNS 50 orang PNS 30 orang PNS 10 orang PNS 30 orang PNS 10 orang PNS	75,000,000	160 orang PNS 250 orang PNS 15 orang PNS 30 orang PNS 10 orang PNS 30 orang PNS 10 orang PNS	75,000,000	160 orang PNS 299 orang PNS 15 orang PNS 66 orang PNS 10 orang PNS 0 orang PNS 10 orang PNS	135,500,000	200 orang PNS 250 orang PNS 50 orang PNS 30 orang PNS 10 orang PNS 0 orang PNS 10 orang PNS	150,000,000	200 orang PNS 250 orang PNS 50 orang PNS 30 orang PNS 10 orang PNS 30 orang PNS 10 orang PNS
19		Kegiatan Pembuatan Data Base Kepegawaian Setda Provnsi Jambi	Mewujudkan tata kelola kepegawaian yang baik lingkup Setda Provinsi Jambi	Tersedianya informasi/dokumen data base jumlah PNS di Lingkup Setda	Jlh PNS izin cuti Pejabat eselon I dan II proses penilaian DP.3 Proses perceraian PNS Jlh usulan Satria Lencana Karya Satya kepada PNS Jlh buku/dokumen DUK PNS	-	-	-	-	-	-	100,000,000	50 orang 17 orang 0 orang 30 orang PNS 1 dokumen	100,000,000	50 orang 17 orang 0 orang 30 orang PNS 1 dokumen
VI	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur													
20		Kegiatan kontribusi, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	Mewujudkan profesionalitas aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi	Meningkatnya profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugasnya	Jlh usulan kursus Jlh usulan diklat Jlh usulan bimtek	100,000,000	20 orang 10 orang 20 orang	100,000,000	20 orang 10 orang 20 orang	100,000,000	20 orang 10 orang 20 orang	100,000,000	20 orang 10 orang 20 orang	150,000,000	27 orang 10 orang 20 orang

21		Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Mewujudkan Penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	Terwujudnya Penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki	Tersusunnya Pergub Analisis Jabatan Provinsi yang telah di Validasi	170,000,000	Pergub		Pergub	230,000,000	Pergub	180,500,000	Pergub	350,000,000	Pergub
22		Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan ABK	Mewujudkan Penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan Beban Kerja	Terwujudnya Penempatan aparatur yang efektif dan tepat guna sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan Beban Kerja	Tersusunnya Pergub tentang Formasi Jabatan dan Pergub ABK		Pergub dan Dokumen Faktor Jabatan		Pergub dan Dokumen Faktor Jabatan	205,000,000	Pergub dan Dokumen Faktor Jabatan	220,000,000	Pergub dan Dokumen Faktor Jabatan	300,000,000	Pergub dan Dokumen Faktor Jabatan
23		Kegiatan Penataan Perpustakaan Setda Provinsi Jambi	Mewujudkan peningkatan Kualitas SDM PNS Perangkat Daerah terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga menghasilkan PNS Profesional dan Ahli dibidangnya	Terwujudnya peningkatan Kualitas SDM PNS Perangkat Daerah terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensi yang dimiliki, sehingga menghasilkan PNS Profesional dan Ahli dibidangnya	Tersedianya Buku-Buku guna menunjang peningkatan SDM PNS Setda Provinsi Jambi	10,000,000	Penambahan koleksi buku perpustakaan Setda Provinsi Jambi, sebanyak 685 buku	10,000,000	Penambahan koleksi buku perpustakaan Setda Provinsi Jambi, sebanyak 162 buku	10,000,000	Penambahan koleksi buku perpustakaan Setda Provinsi Jambi, sebanyak 123 buku	40,000,000	Penambahan koleksi buku perpustakaan Setda Provinsi Jambi, sebanyak 853 buku	45,000,000	Penataan interior perpustakaan Setda Provinsi Jambi, sebanyak 1.177 buku
Jumlah						1,482,500,000		1,863,500,000		2,638,000,000		3,049,000,000		4,091,000,000	

Jambi, Januari 2012

Kepala Biro Organisasi

dto

Ir. AKHDIYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600826 198603 1 005

